



**IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT– MANDIRI PERKOTAAN DI KOTA SORONG**

Ratna Rosmauli Pakpahan, Febe Maryona Tahitu

Jurusan Administrasi Publik

(Naskah diterima: 1 September 2019, disetujui: 28 Oktober 2019)

Abstract

The approach used in this study is a qualitative approach. This study will analyze social phenomena, namely the implementation of a national independent community empowerment program in Sorong City. This type of research based on research objectives included in the descriptive research; based on research benefits including pure research; and based on the time dimension included in the cross sectional study. Data collection techniques used in this study are qualitative data collection techniques, namely field studies and library research. Data Analysis Techniques Qualitative data analysis conducted in this study began by processing and preparing the data obtained, both through field studies, as well as literature studies for analysis. Data obtained from informants conducted through in-depth interviews are made in the form of interview transcriptions. Through this research, it is expected to provide a way out for the Government regarding the problem of PNPM Mandiri and be able to follow up on the next program that will be carried out for the development of Sorong City. The final results of this research will be published in the administrative and organizational science journals (ISSN 0854-3844) <http://journal.ui.ac.id/jbb> publication year 2019 and if possible the results of this study will be used as teaching material.

Keywords: *Community Empowerment; Urban PNPM-Mandiri; Public policy; Policy Implementation; and Sorong City*

Abstrak

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan menganalisis fenomena sosial, yaitu implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan di Kota Sorong. Jenis Penelitian berdasarkan Tujuan Penelitian termasuk ke dalam penelitian deskriptif; berdasarkan manfaat penelitian termasuk penelitian murni; dan berdasarkan dimensi waktu tergolong dalam penelitian cross sectional. Teknik Pengumpulan Data digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu studi lapangan (field research) dan studi kepustakaan (library research). Teknik Analisis Data analisis data kualitatif yang dilakukan pada penelitian ini dimulai dengan mengolah dan mempersiapkan data-data yang diperoleh, baik melalui studi lapangan, maupun studi kepustakaan untuk dianalisis. Data yang diperoleh dari informan yang dilakukan melalui wawancara mendalam dibuat dalam bentuk transkripsi wawancara. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat

memberikan jalan keluar untuk Pemerintah mengenai masalah PNPM mandiri serta dapat menindaklanjuti program selanjutnya yang akan dilakukan demi pengembangan Kota Sorong. Hasil akhir dari penelitian ini akan dipublikasikan pada jurnal ilmu administrasi dan organisasi (ISSN 0854-3844) <http://journal.ui.ac.id/jbb> tahun publikasi 2019 dan jika dimungkinkan hasil penelitian ini akan dijadikan bahan ajar.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat; PNPM-Mandiri perkotaan; Kebijakan publik; Implementasi Kebijakan; dan Kota Sorong.

I. PENDAHULUAN

Desentralisasi adalah suatu proses pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dimanifestasikan dalam pelaksanaan otonomi daerah (tertuang dalam UU Nomor 9 tahun 2015). Pelaksanaan otonomi daerah memiliki tujuan utama yaitu Pemerintah Daerah menuju kemandirian dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didasarkan pada asas umum tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan otonomi daerah diharapkan potensi-potensi daerah dapat lebih tergali dan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat lebih meningkat serta membantu pemerintah untuk mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga dapat memenuhi setiap kebutuhan masyarakat. Namun pada kenyataannya suara masyarakat belum menjadi satu-satunya hal yang disoroti dan diutamakan.

Salah satu wewenang Otonomi daerah yaitu membuat Kebijakan Publik. Kebijakan publik tidak terjadi begitu saja, melainkan ha-

rus melalui proses dan tahapan. Tahapan tersebut terdiri dari Perencanaan (perumusan kebijakan), Implementasi (pelaksanaan kebijakan), dan Evaluasi (penilaian kebijakan).

Tahapan implementasi (pelaksanaan) kebijakan publik merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2008:146) [1] membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Kebijakan publik yang ada di Indonesia sudah sangat banyak yang ditetapkan dan dilaksanakan, khususnya tingkat daerah. Kebijakan tersebut pada umumnya diturunkan menjadi program-program yang dapat mensukseskan tujuan kebijakan tersebut. Kebijakan yang

dibuat sudah seharusnya diimplementasikan. Suatu kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan.

Berdasarkan studi implementasi Van Meter dan Van Horn dalam Winarno, (2008 :148) [1] mengatakan bahwa kajian para ilmuwan politik terkait kebijakan publik masih ditemukan kekurangpahaman terhadap implementasi kebijakan. Hal inilah yang mendorong peneliti segera mengaitkan kegagalan suatu kebijakan dengan perencanaan yang tidak memadai atau tidak memadainya program itu sendiri ketika mereka diperhadapkan dengan suatu program yang tidak berhasil. Beberapa studi yang dilakukan untuk mengkaji implementasi kebijakan dinilai sangat informatif, namun karena kurangnya perspektif teoritik yang dapat digunakan untuk menjadi landasan kerja studi tersebut, maka sumbangan studi-studi ini pun sangat terbatas.

Kebijakan yang dibuat merupakan hasil dari pengamatan terhadap masalah publik. Salah satu permasalahan yang dari dulu, kini dan tidak menutup kemungkinan sampai seterusnya menjadi sorotan ialah permasalahan pembangunan, lingkungan dan kemiskinan. Kota sorong adalah lokasi yang peneliti ambil untuk melakukan penelitian dengan skema

Penelitian Dosen Pemula (PDP) untuk melihat implementasi kebijakan/program. Di Kota Sorong ada beberapa program yang diambil untuk menjawab permasalahan pembangunan, lingkungan dan kemiskinan, salah satunya yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri perkotaan. Tujuan program tersebut yaitu membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara bertahap serta membantu mewujudkan visi kota sorong yaitu “terwujudnya masyarakat kota yang setara, bersahabat dan dinamis”. Program tersebut (PNPM – Mandiri Perkotaan) di Kota Sorong telah masuk sejak tahun 2006 hingga saat ini. Namun yang menjadi permasalahan adalah pelaksanaan program disinyalir tidak sesuai dengan tujuannya, dan tidak berjalan secara rutin, hal ini peneliti temukan di lapangan berdasarkan pengambilan data awal. Inilah yang menjadi latar belakang atau alasan peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perkotaan di Kota Sorong.

II. KAJIAN TEORI

Konsep Kebijakan Publik. “policy is defined as a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness

on the part of both those who make it and those who abate by it.” (Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, *Labyrinths of Democracy*, Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1973, hlm 485, dalam Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, 1981, hlm 2) [5]. (Kebijakan dirumuskan sebagai sesuatu keputusan yang teguh yang disifati oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari keduanya yakni bagi orang-orang yang membuatnya dan bagi orang-orang yang melaksanakannya). Sedangkan menurut Thomas R. Dye, public policy merupakan apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan (whatever government choose to do or not to do). (Thomas R.Dye, *Understanding Public Policy*, 2008, hlm 1) [6].

Implementasi Kebijakan. Secara etimologis kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “to implement”. Van Meter dan Van Horn merumuskan proses implementasi ini sebagai berikut:

Those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya

tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (dalam Abdul Wahab, 2001 : 65) [7].

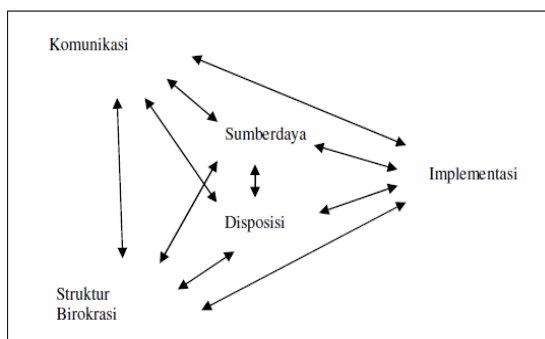
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, bahwa implementasi sebagai pelaksanaan berbagai keputusan yang menyediakan sarana dalam pelaksanaan serta dapat menimbulkan efek atau dampak dan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu maupun pejabat yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah digariskan. Pelaksanaan kebijakan sesuatu yang penting bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan.

Penekanan selanjutnya oleh Nataniel (2015:42-43) [8] mengatakan bahwa pada dasarnya pengertian implementasi kebijakan bukan hanya terkait dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin birokrasi, melainkan pada masalah aspek perwujudan kebijakan serta dalam kondisi bagaimana kebijakan tersebut dibuat, siapa yang membuat, akibat dari kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut setelah diimplementasikan.

Implementasi kebijakan merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan. Pada tahap formulasi diterapkan strategi dan tujuan kebijakan, sedangkan tindakan untuk mencapai tujuan diselenggarakan pula pada

tahap implementasi kebijakan. Implementasi juga merupakan seperangkat kegiatan yang dilakukan yang mengikuti satu keputusan yang telah diterbitkan, dengan tujuan untuk mencapai sasaran tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu. (Nataniel 2015:43).

Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) [9] terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Gambar Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi menurut Edward III



PNPM Mandiri Perkotaan. PNPM Mandiri Perkotaan adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pember-

dayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan (Buku Pedoman Umum PNPM Mandiri, Tim Pengendali PNPM Mandiri 2007/2008) [10].

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk ke dalam penelitian deskriptif; berdasarkan manfaat penelitian termasuk penelitian murni; dan berdasarkan dimensi waktu tergolong dalam penelitian cross sectional.

B. Metode Penelitian

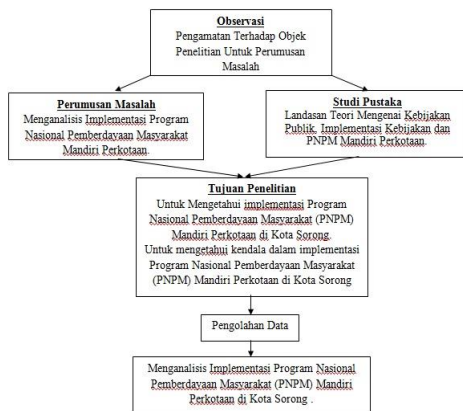
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu studi lapangan (field research) dan studi kepustakaan (library research).

C. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dimulai dengan mengolah dan mempersiapkan data-data yang diperoleh, baik melalui studi lapangan, maupun studi kepustakaan untuk dianalisis. Data yang diperoleh dari informan yang dilakukan melalui kuesioner dan wawancara mendalam dibuat dalam bentuk transkripsi wawancara (Creswell, 2010: 286).

D. Flow Chart

Adapun Flowchart dalam penelitian ini seperti pada Gambar sebagai berikut:



IV. HASIL PENELITIAN

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Kota Sorong sudah ada sejak tahun 2006. Di kota

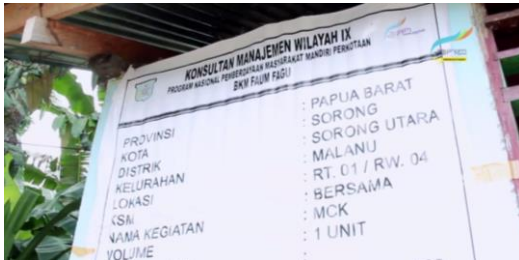
Sorong terbagi kedalam 6 (enam) Distrik yaitu Distrik Sorong Kota, Distrik Sorong Manoi, Distrik Sorong Utara, Distrik Sorong Timur, Distrik Sorong Barat dan Distrik Kepulauan. Masing-masing Distrik dengan bidang yang berbeda-beda. Bidang yang ada dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Kota Sorong yaitu Bidang Lingkungan, Bidang Sosial, dan Bidang Ekonomi.

Perkembangan masing-masing bidang dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Kota Sorong, Pertama bidang lingkungan. Sejak tahun 2006 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Kota Sorong mulai membangun infrastruktur dan sosial. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Kota sorong dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Kota Sorong yaitu pembangunan air dan pipanisasi. Semua diawali dengan pengajuan proposal yang kemudian disetujui. Persetujuan proposal ini kemudian menumbuhkan rasa gotong royong dan memunculkan swadaya masyarakat yang sangat besar. Masyarakat secara bersama-sama membangun aliran pipa-pipa untuk disalurkan kerumah-rumah warga. Hasil pembangunan lain-

nya yang dibuat dalam lingkungan masyarakat yaitu 2 buah MCK yaitu di Malanu Distrik Sorong Utara.



Gambar 1. MCK di Malanu Distrik Sorong



Gambar 2. Keterangan KSM bidang lingkungan.

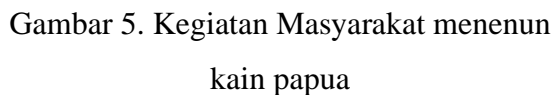
Kedua, bidang ekonomi tahun 2007 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Kota Sorong yaitu ekonomi peduli berupa simpan pinjam. Simpan pinjam diberikan kepada beberapa KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yaitu sebanyak 894 KSM, dari 4550 warga miskin dengan perbandingan 4269 warga perempuan sedangkan 281 warga laki-laki. Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Kota Sorong bidang ekonomi bentuk simpan pinjam yaitu memudahkan pemberian modal usaha dan

mengangkat pendapatan warga miskin di Perkotaan. Beberapa KSM dibawah ketua Ibu Rahima memiliki usaha yang berkembang, begitu juga dengan ibu Salomina (ibu rumah tangga yang memiliki dua anak) ketua KSM lainnya telah melakukan pinjaman tahap ketiga dan telah lunas. Total dana ekonomi bergulir sampai akhir tahun 2013 sebesar 1,7 M dari total perguliran 2,8 M. Saldo yang masih ada di KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) sebesar 1,3 M.



Gambar 3. Distrik Kepulauan

Ketiga, bidang sosial Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Kota Sorong yaitu pembuatan dan penjualan kain tenun tradisional papua. KSM tenun adalah nama kelompok swadaya masyarakat bidang sosial yang berlokasi di Klademak Distrik Sorong Kota. Tujuan KSM tenun yaitu melestarikan dan memproduksi kain tenun papua.



Gambar 6. PAUD Melati, bantuan PNPM

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Kota Sorong merupakan program pemerintah pusat dan daerah, salah satu daerah yang menjalankan program tersebut yaitu Kota Sorong. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Kota Sorong memiliki tujuan membantu kemandirian masyarakat dan menanggulangi kemiskinan masyarakat secara berkelanjutan. Program pengentasan kemiskinan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Kota Sorong mulai menampakkan hasil, yakni terbentuknya infrastruktur yang menunjang kemandirian masyarakat dalam perekonomian dan kesejahteraan sosial. Namun dalam penelitian yang peneliti lakukan akan dikaji menggunakan teori Edward III yang terdiri dari beberapa faktor.

1. Komunikasi

Komunikasi kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Kota Sorong telah dilakukan sejak tahun 2006 hingga sekarang. Komunikasi ini terlihat dari sudah berjalannya program tersebut dan bahkan saat ini sudah dapat dilakukan evaluasi program tersebut. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Kota Sorong merupakan

program Nasional yang diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. Dan demi terwujudnya keseragaman diseluruh daerah yang ada, maka program ini dibuat disertai dengan Petunjuk Pelaksanaannya.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Kota Sorong jika dilihat dari sisi komunikasi sudah berjalan dengan baik hal ini ditunjukkan dari sudah berjalannya program tersebut dan masih berjalan sampai sekarang.

Komunikasi Program memiliki beberapa dimensi yaitu dimensi transmisi (transmission), dimensi kejelasan (clarity), dan dimensi konsistensi (consistency). Pertama dimensi transmisi (transmission) yaitu komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sorong dalam menyampaikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Kota Sorong oleh Departemen Pekerjaan Umum kepada kelompok sasaran program yaitu seluruh lapisan masyarakat baik perkotaan maupun pedesaan. Dan komunikasi yang dilakukan berjalan. Hal ini membuktikan bahwa komunikasi dimensi transmisi telah berjalan. Kedua, Dimensi kejelasan (clarity) bahwa program yang ditransmisikan kepada pelaksana dalam hal ini dari Pemerintah Kota kepada Departemen Pekerjaan Umum, dan kepada

lapisan terakhir yaitu masyarakat sampai dengan adanya kejelasan pelaksanaan program. Ketiga Dimensi konsistensi (consistency), yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi sudah konsisten dan jelas sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Konsistensi yang dimaksud dalam hal ini adalah apa yang di anjurkan untuk dilakukan harus dilaksanakan secara terus-menerus tanpa terputus yaitu mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam hal pelaksanaan program, dan segala sesuatu yang menjadi penunjang pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Kota Sorong dalam bentuk sosialisasi sudah dilakukan secara terus menerus dan bahkan di dukung dengan pemantuan.

Jika ditinjau dari sisi komunikasi, bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Kota Sorong sampai saat ini sudah berjalan.

2. Sumber Daya

Edward III mengatakan bahwa “probably the most essential resources in implementing policy is staff”. Edward III dalam Widodo (2010:98) menambahkan “no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if

personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective". Yang artinya bahwa sumber daya yang paling penting dalam implementasi program adalah sumber daya manusia, dimana kejelasan dan kekonsistenan implementasi program serta keakuratan dalam mengimplementasikan program menjadi tidak berguna jika pelaksana program tidak melaksanakan program itu.

Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan. Pertama Sumber daya manusia yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu sumber daya manusia mulai dari Departemen Pekerjaan Umum sampai kepada masyarakat perkotaan yang tersebar dalam 6 Distrik di Kota Sorong. Departemen Pekerjaan Umum telah melakukan tugasnya dalam mensosialisasikan program tersebut dan masyarakat sebagai penerima program dan pelaksana program pun telah melaksanakan program tersebut dengan baik.

Kedua, sumber daya anggaran, Edward III dalam Widodo (2010:101) mengatakan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program. Anggaran yang diperlukan merupakan komponen terbesar, dikarenakan hal ini

berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat.

Ketiga, sumber daya peralatan atau yang biasa disebut sebagai sarana dan prasarana adalah semua sarana dan prasarana yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Kota Sorong. Sarana yang dimaksud yaitu bidang sosial misalnya adanya Posyandu, PAUD, dan tempat untuk melakukan penenunan untuk diproduksi dan didistribusikan, kemudian bidang lingkungan yaitu tersedianya pipa atau tempat penampungan air bersih, sedangkan bidang ekonomi yaitu adanya lahan untuk masyarakat dapat melakukan jualan.

Keempat, sumber daya kewenangan. Kewenangan dari kata dasar wewenang didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai hak dan kewajiban untuk bertindak; kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Kota Sorong memiliki struktur pelaksana bertingkat. Artinya terdapat beberapa jenjang yang saling berhubungan, baik hubungan pertanggungjawaban secara vertikal maupun hubungan koordinasi secara horizontal. Dan kewe-

nangan dalam mensukseskan program tersebut diberikan kepada masyarakat sendiri sehingga mampu mengukur dan menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing pribadi masyarakat.



Gambar 7. Kantor Konsultan PNPM Kota Sorong

3. Disposisi

Edward III dalam Widodo (2008:104) menyatakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan program secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan program dapat diwujudkan. Jika implementasi program ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementor) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan program itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan program tersebut.

Tiga elemen respon yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu program antara lain terdiri dari pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understand-

ing) terhadap program. Pengetahuan, pemahaman dan pendalaman baik dari departemen pekerjaan umum maupun masyarakat seiring berjalannya waktu semakin menambah pengetahuan, pemahaman dan pendalaman. Dan hal ini terbukti dari pelaksanaan program dengan tujuan yang telah tercapai.

4. Struktur Birokrasi

Dengan merujuk pada peran yang dijalankan birokrasi dalam proses implementasi seperti diungkapkan diatas, maka mengetahui struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi program. Aspek struktur birokrasi ini meliputi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Mekanisme, dalam implementasi program biasanya sudah dibuat Standard Operational Procedure (SOP) menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan program tidak melenceng dari tujuan dan sasaran program. Hal ini terbukti dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Kota Sorong melaksanakan program berpatokan pada Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian kajian hasil penelitian secara kualitatif Implementasi Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Kota Sorong berdasarkan 4 (faktor) menurut Edward III sudah dan masih terus berlangsung sampai sekarang, mengingat program tersebut masih terus berlangsung, sehingga implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Kota Sorong masih terus berlangsung, seiring berjalan waktu tujuan dari implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Kota Sorong belum sepenuhnya terwujud, dikarenakan masih terdapat beberapa daerah yang mengalami maju mundur dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Kota Sorong. Oleh karena itu perlu peningkatan dan pemantauan serta motivasi dalam mengimplementasikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Kota Sorong.

DAFTAR PUSTAKA

- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.
- Yuliati Natalia, Son Suwasono, Sugeng Rusmiwari. 2012. *Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Dalam Mensejahterakan Masyarakat*. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 1(1): 40-48.
- Sri Maryuni. 2015. *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Di Kota Pontianak*. Spirit Publik. 10(1): 19-30
- Putu Bayu Putra Mahendra, I Nyoman Mahaendra Yasa, Ni Nyoman Yuliarmi. 2017. Analisis Pengaruh Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mp) Terhadap Produktivitas Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Denpasar Utara. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 6(3): 1019-1048.
- Dye, Thomas R. 1981. *Understanding Public Policy Fourth Edition*. New jersey: prentice hall
- _____. 2008. *Understanding Public Policy Eleventh Edition*. New jersey: prentice hall.
- Abdul Wahab, Solichin. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi*.
- Nataniel, Elake. 2015. *Kebijakan Publik dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir*. Yogyakarta: The Phinisi Press.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media. *Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.